

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Pada tahun 2021 pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan kegiatannya memperhatikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah.

Sejalan dengan amanat RPJMD tersebut, penjabaran isu isu strategis secara fokus telah tertuang dalam Renstra DPUPR dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
2. Memperbesar aksesibilitas wilayah
3. Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Selain itu, pada tahun 2021 dikembangkan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan misi pembangunan sebagai amanat RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM

2. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
3. Penataan Administrasi Pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
4. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan.

I.2. Internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Faktor internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan anggaran

Sebagai dinas teknis yang output utamanya adalah infrastruktur maka kemampuan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian kinerja. Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rekapitulasi perkembangan kegiatan belanja langsung mengelola anggaran langsung sebesar Rp 171.412.633.024 (SeratusTujuh Puluh Satu Milyar Empat RatusDua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh EmpatRupiah).

2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal diantaranya adalah peta SDM dan struktur organisasi yang ada. Data kepegawaian tahun 2021 terkait jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

a. Pegawai berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Distribusi Pada Unit-Unit Kerja *)

Unit Kerja	JPT Pertama (Es.2B)	Administratur (Es.3A)	Administratur (Es. 3B)	Pengawas (Es.4A)	Pengawas (Es. 4B)	Pejabat Fungsional Ahli	Pejabat Fungsional Terampil	Staf PNS	Σ
Kepala Dinas	1								1
Sekretariat		1		2	-	-	-	20	23
Bidang Bina Program			1	1	-	1	-	2	5
Bidang Bina Marga			1	-	-	2		4	7
Bidang Sumber Daya Air			1	2	-	-	-	2	5
Bidang Penataan Ruang			1	-	-	2	-	2	5
Bidang Cipta Karya			1	2	-	-	5	4	12
UPTD Pengelolaan Alat Berat				-	1	-	-	1	2
UPTDLaboratorium Teknis				-	1	-	-	-	1
UPTD Wilayah Wonosobo				1	-	-	2	6	9
UPTD Wilayah Garung				1	-	-	2	4	7
UPTD Wilayah Sukoharjo				1	-	-	2	5	8
UPTD Wilayah Sapuran				1	-	-	2	4	7
UPTD Wilayah Kaliwiro				1	-	-	2	2	5
JUMLAH	1	1	5	12	2	5	15	56	97

*) Data Kepegawaian per Desember 2021

b. Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Sarjana strata 2 (S2)	9	9,27
2	Sarjana strata 1 (S1)	17	17,52
3	Sarjana muda/diploma	17	17,52
4	SMA/SMK	33	34,02
5	SLTP	15	15,46
6	SD/MI	6	6,18
JUMLAH		97	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2021

c. Pegawai PNS Berdasarkan Eselon

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Eselon *)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Eselon 2B	1	1,03
2	Eselon 3A	1	1,03
3	Eselon 3B	5	5,15
4	Eselon 4A	12	12,37
5	Eselon 4B	2	2,06
6	Non Eselon	76	78,35
JUMLAH		97	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2021

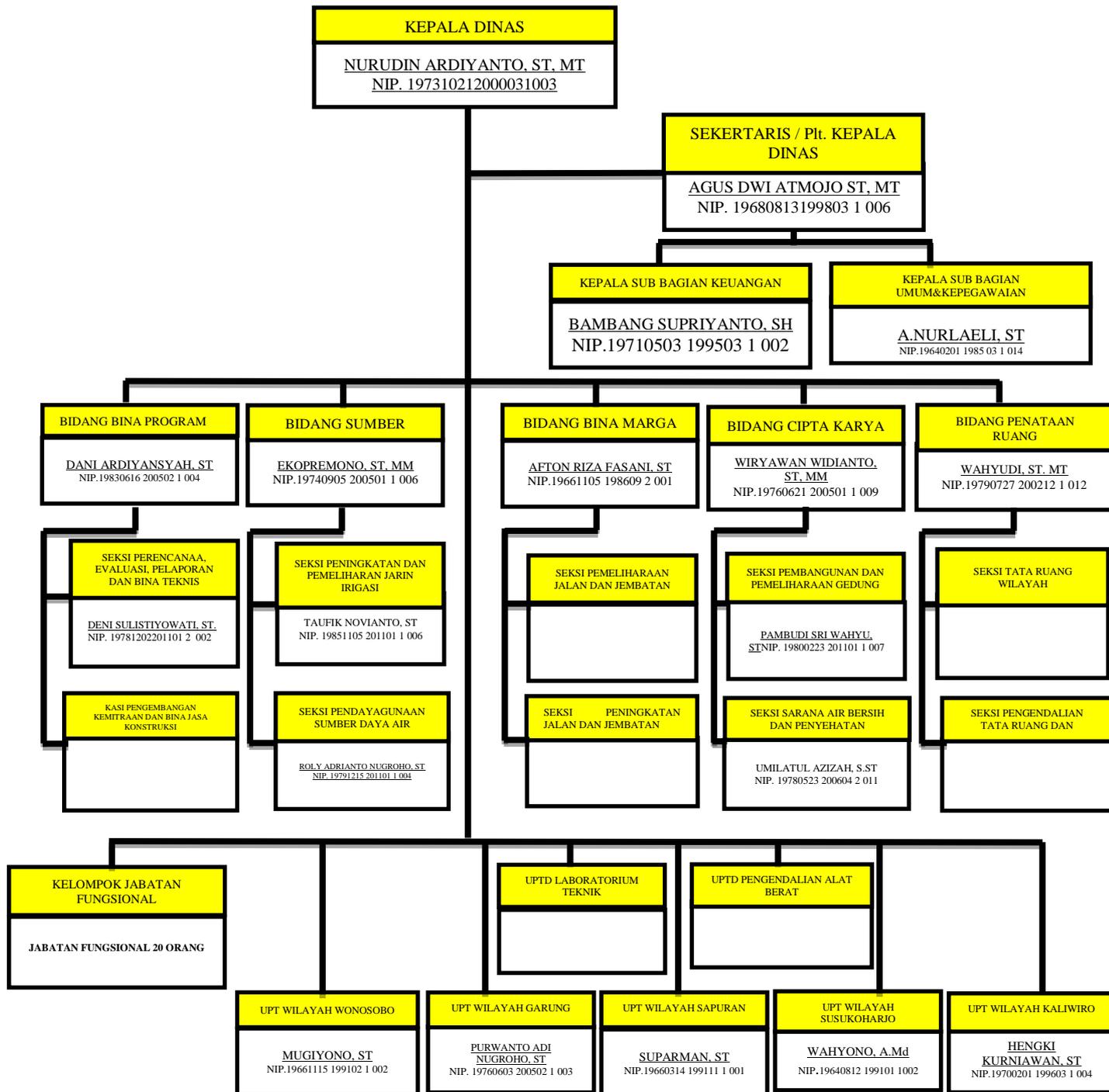
d. Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	Pembina Utama Muda / Ivc	-	-
2	Pembina Tingkat 1/ Ivb	1	1,03
3	Pembina / Iva	6	6,18
4	Penata Tk. 1 / III d	11	11,34
5	Penata / III c	3	3,09
6	Penata Muda Tk. 1 / III b	9	9,27
7	Penata Muda / III a	2	2,06
8	Pengatur / Tk. 1 / II d	21	21,64
9	Pengatur / II c	15	15,46
10	Pengatur Muda Tk. 1 / II b	13	13,40
11	Pengatur Muda / II a	-	-
12	Juru Tk. 1 / Id	15	15,46
13	Juru / Ic	1	1,03
14	Juru Muda Tk. 1 / Ib	-	-
JUMLAH		97	100

*) Data Kepegawaian per Desember 2021

Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta isian pejabatnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo



Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2021

I.3. Strategic Issued

Permasalahan utama yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Dukungan SDM

Dari data pegawai yang sudah disampaikan di atas, tampak bahwa dukungan sumber daya manusiadi Dinas PUPR baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan lanjut berupa diploma dan sarjana tidak lebih dari 44%. Prosentase tenaga teknis dibandingkan non teknis PNS di lingkungan DPUPR adalah 54%.

2. Kewenangan Yang Sangat Besar

Kewenangan yang dimiliki Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat besar. Untuk bidang jalan, sesuai surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 620/300/2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagaijalan Kabupaten diatur mengenai jumlah ruas dan panjang jalan yang menjadi kewenangan yaitu 276 ruas dengan panjang 999,276 kilometer. Untuk irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/KPTS/M/2015 tahun 2015 menyatakan bahwa di Kabupaten Wonosobo, daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sebanyak 705 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 21.050 Hektar.

Terkait target pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum, terdapat 2 SPM yang kesemuanya sangat sulit untuk dicapai jika melihat penanganan dan penganggaran saat ini. SPM tersebut adalah

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Sebagai salah satu layanan dasar, sampai dengan tahun 2021 capaian SPM ini adalah sebesar 92,93%

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

Sebagai salah satu layanan dasar, sampai dengan tahun 2021 capaian SPM ini adalah sebesar 78,24%

Besarnya angka rencana capaian yang tidak sebanding dengan tren kemampuan pembiayaan daerah untuk sektor ini menjadi masalah mendasar sulitnya upaya pemenuhan SPM dalam jangka dekat.

3. Anggaran Yang Sangat Terbatas

Besarnya kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki seharusnya diimbangi dengan alokasi anggaran infrastruktur yang dikelola. Namun demikian, karena anggaran yang sangat terbatas maka alokasi yang diterima oleh DPUPR masih belum mampu menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana disampaikan diatas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dalam APBD Tahun 2021. Pada Tahun 2021, DPUPR melaksanakan 10 program yang diharapkan dapat melaksanakan 6 sasaran strategis sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

Table 2.1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan	75 %
2	Meningkatnya cakupan layanan irigasi	Presentase jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	75%
3	Meningkatnya cakupan layanan air minum	Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak	100%
4	Meningkatnya cakupan layanan akses sanitasi dasar	Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi	100%
5	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	53%
6	Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan	Indeks kepuasan masyarakat	100%
		Nilai evaluasi SAKIP dinas PUPR	100%

Untuk mewujudkan target kinerja yang sudah di tetapkan tersebut, Dinas PUPR sebagaimana tertuang Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp **186.479.306.585** (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat RatusTujuh Puluh Sembilan JutaTiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) untuk melaksanakan 12 program. Rincian anggaran perprogram dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2. Program Dan Anggaran Belanja Langsung Di Dinas PUPR
Sebagaimana Tertuang Dalam APBD Kab. Wonosobo TA 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN PENETAPAN 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 13.245.580.385
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 5.220.000.000
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 18.757.893.000
4	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.000.000.000
5	Program Pengembangan Permukiman	Rp 700.000.000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp14.035.000.000
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	RP 1.110.000.000
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp18.495.519.000
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.645.858.000
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 104.267.456.200
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 260.000.000
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 742.000.000
JUMLAH		Rp 186.479.306.585

Didalam Perjanjian Kinerja (KP) Perubahan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, alokasi anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo berkurang menjadi 171.412.633.025 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Lima Rupiah). Ada 12 program yang mengalami perubahan (bertambah / berkurang) alokasi anggaran. Rincian program dan alokasi anggaran per program sebagaimana tertuang dalam PK Perubahan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Program Dan Anggaran Belanja Langsung Di Dinas PUPR Yang Mengalami Perubahan (Bertambah / Berkurang)

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN 2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 11.868.155.932
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp -
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 18.803.293.000
4	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp775.000.000
5	Program Pengembangan Permukiman	Rp 795.000.000
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp13.335.000.000
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	RP -
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp19.525.159.000
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.205.858.000
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 97.123.167.093
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 165.000.000
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 817.000.000
JUMLAH		Rp 171.412.633.025

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur melalui hasil pengukuran kinerja organisasi pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja pada setiap sasaran strategis yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan

Didalam sasaran strategis ini terdapat empat indikator kerja yaitu :

a. Tingkat Kemantapan jalan

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2021 adalah 75%, dan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 60,6 % hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 80,8%

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2021 berada dibawah target jangka menengah. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2022 dapat tercapai.

b. Presentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2021 adalah 75%, dan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 67,54 % hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut terealisasi 90,05%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2021, maka upaya penyediaan irigasi dalam kondisi baik melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi maupun pemeliharaan saluran irigasi perlu di akselerasi sehingga target akhir tahun perencanaan 2022 dapat tercapai.

c. Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2021 adalah 100%, dan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 92,93% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 92,93%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2021 belum mencapai jangka menengah yaitu sebesar 100% Namun demikian perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2022 bisa tercapai.

d. Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi

Pada indikator ini, target kinerja yang harus dicapai sampai akhir tahun 2021 adalah 100%, dan capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 78,24% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut hanya terealisasi 78,24%.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan tahun 2021 belum melampaui target jangka menengah yaitu sebesar 100%. Namun demikian perlu adanya upaya akselerasi pada tahun berikutnya sehingga target akhir tahun perencanaan 2022 bisa tercapai.

e. Nilai Evaluasi SAKIP DPUPR

Pada indikator ini, target yang harus dicapai sampai akhir tahun 2021 adalah 100% dan capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 64,27% hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut sebesar 64,27%.

Capaian penilaian SAKIP ini masih lebih rendah dari capaian nilai rata rata kabupaten sebesar 68,63 untuk itu perlu peningkatan kapasitas penilaian SAKIP ditahun yang akan datang.

Tabel 3.1. Rincian realisasi kegiatan

NO.	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja 2021	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat kemantapan jalan	75%	60,6%	80,80%
2	Presentase jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	75%	65,54%	90,05%
3	Presentase penduduk mendapatkan akses air minum layak	100%	92,93%	92,93%
4	Presentase penduduk mendapatkan akses sanitasi	100%	78,24%	78,24%
5	Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	53%	82,56%	
6	Indeks kepuasan masyarakat	100%	86,11%	86,11%
	Nilai evaluasi SAKIP dinas PUPR	100%	64,27%	64,27%

Sedangkan realisasi masing masing kegiatan dalam program dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran per Kegiatan dalam Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	BELANJA LANGSUNG	171.412.633.025	139.136.777.691	81,17
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	11.868.155.932	11.403.065.914	96,08
2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18.803.293.000	18.572.979.066	98,78
4	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	775.000.000	738.611.350	95,30
5	Program Pengembangan Permukiman	795.000.000	617.224.472	77,64
6	Program Penataan Bangunan Gedung	13.335.000.000	13.084.277.200	98,12
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.525.159.000	15.615.649.824	79,98
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.205.858.000	8.188.723.904	99,79
10	Program Penyelenggaraan Jalan	97.123.167.093	70.285.292.196	72,37
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	165.000.000	101.542.028	61,54
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	817.000.000	529.411.737	64,80

Catatan : Realisasi keuangan adalah data *unaudited*

Secara angka realisasi anggaran belanja langsung di Dinas PUPR tidak banyak berkembang dari realisasi tahun 2021 yaitu di angka 81,17%. Sebagaimana sajian tabel diatas, hanya terdapat program yang memiliki capaian realisasi keuangan di bawah 75% yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan , dengan realisasi anggaran sebesar 72,37%,
2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan realisasi anggaran sebesar 61,54%,
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan realisasi anggaran 64,8%.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo sepanjang tahun 2021 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terlihat cukup optimal dan maksimal, hal ini tercermin dari realisasi anggaran sebesar 81,17%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas telah mampu memanfaatkan dukungan anggaran yang tersedia dengan maksimal. Kegiatan yang tidak terealisasi didominasi pada prinsip ketaatan terhadap aturan pelaksanaan kegiatan yaitu terkait dengan kewenangan dan duplikasi anggaran yang rawan pelanggaran terhadap aturan pengadaan barang jasa.

Namun demikian beberapa catatan yang dapat dijadikan bekal bagi perbaikan kinerja kedepan antara lain :

1. Melanjutkan upaya memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah. UPT Wilayah saat ini terus didorong untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang menunjang tugas khususnya pemeliharaan jalan dan irigasi. Tahapan selanjutnya adalah perlunya peningkatan kelembagaan berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM sebagai salah satu pilar keberhasilan organisasi.
2. Mendorong strategi baru dalam upaya akselerasi pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum. Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum disadari saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu strategi inovatif perlu untuk dikembangkan dengan sinergi dengan stakeholder potensial.
3. Mendorong upaya peningkatan kesepahaman terkait aturan – aturan pelaksanaan kegiatan. Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan tingkat realisasi anggaran adalah masih terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Beberapa alasan yang jamak dijumpai adalah kegiatan diluar kewenangan dan duplikasi anggaran. Untuk itu perlu

duduk bersama eksekutif dan legislatif dalam forum yang mengkomunikasikan aturan aturan yang melingkupi proses pelaksanaan kegiatan yaitu aturan pengadaan barang/jasa, kewenangan kabupaten, aturan penanganan air minum, aturan tentang hibah, status jalan kabupaten dan status daerah irigasi kewenangan kabupaten. Pemahaman awal khususnya pada tahapan perencanaan akan mengurangi resiko duplikasi anggaran dan kegiatan kegiatan yang bukan kewenangan kabupaten.

4. Mendorong untuk melaksanakan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini disusun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19731021 20003 1 033